

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS SILIWANGI
TASIKMALAYA
2020**

ABSTRAK

MEGA BALQIS HERDIANTI RACHMAN

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
(SPM) KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS DI
WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2021**

Tuberkulosis menjadi salah satu prioritas masalah di Indonesia tertuang pada peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2020 tentang rencana strategis kementerian kesehatan tahun 2020-2024. Laporan evaluasi penilaian kinerja Puskesmas (PKP) tahun 2020 yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta, angka cakupan pelayanan terduga tuberkulosis seluruh Puskesmas di Kabupaten Purwakarta masih dibawah target yang sudah ditentukan dengan angka cakupan 47.01 %.Peneliti menggunakan informan utama sebanyak 5 orang yang merupakan pemegang program tuberkulosis di Puskesmas.Informan triangulasi ialah 1 orang pemegang program TB Dinas Kesehatan, 1 orang kepala seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular, 6 orang kader tuberkulosis, 5 pasien tuberkulosis, dan 1 Koordinator Konsorsium Komunitas Penabulu-STPI. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kebijakan standar pelayanan minimal kesehatan orang terduga tuberkulosis di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teori model implementasi dari George C Edwards III yang terdapat 4 variabel diantaranya, komunikasi, sumber-sumber kebijakan, kecenderungan dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang terjalin cukup baik. Sumber-sumber kebijakan kesehatan orang terduga tuberkulosis salah satunya standar jumlah dan kualitas sumberdaya kesehatan masih kurang mencukupi. Sikap para pelaksana pelayanan terduga TB mengalami beberapa hambatan-hambatan, dan Struktur Birokrasi dijalankan sesuai dengan pedoman peraturan Kementerian Kesehatan. Saran: Melakukan monitoring dan evaluasi, memanfaatkan fasilitas yang ada dan mengaktifkan kembali kader TB.

Kata Kunci : Tuberkulosis, kebijakan, pelayanan kesehatan

**FACULTY OF HEALTH SCIENCES
DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH
SILIWANGI UNIVERSITY
TASIKMALAYA
2020**

ABSTRACT

MEGA BALQIS HERDIANTI RACHMAN

**IMPLEMENTATION OF THE MINIMUM SERVICE STANDARDS (SPM)
HEALTH POLICY FOR PEOPLE SUSPECTED WITH TUBERCULOSIS
IN THE WORKING AREA OF THE PURWAKARTA DISTRICT
HEALTH OFFICE YEAR 2021**

Tuberculosis is one of the priority problems in Indonesia as stated in the regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia number 21 of 2020 concerning the ministry of health's strategic plan for 2020-2024. The 2020 Puskesmas performance assessment (PKP) evaluation report carried out by the Purwakarta District Health Service, shows that the coverage rate for suspected tuberculosis services in all Puskesmas in Purwakarta Regency is still below the target that has been determined with a coverage rate of 47.01%. The researcher used 5 main informants who were stakeholders. tuberculosis program at the Puskesmas. The triangulation informants were 1 person holding the TB program at the Health Service, 1 head of the infectious disease prevention and control section, 6 tuberculosis cadres, 5 tuberculosis patients, and 1 Coordinator of the Penabulu-STPI Community Consortium. The aim of this research is to analyze the minimum health service standard policy for people suspected of tuberculosis in the work area of the Purwakarta District Health Service. This research uses a descriptive qualitative research method with the implementation model theory from George C Edwards III which contains 4 variables including communication, policy sources, tendencies and bureaucratic structure. The research results show that communication is quite good. One of the sources of health policy for people suspected of tuberculosis is that the standard for the quantity and quality of health resources is still insufficient. The attitude of TB suspect service implementers experiences several obstacles, and the bureaucratic structure is carried out in accordance with the Ministry of Health's regulatory guidelines. Suggestions: Carry out monitoring and evaluation, utilize existing facilities and reactivate TB cadres.

Keywords : Tuberculosis, policy, health services